

# EVALUASI KINERJA KEUANGAN PT. PLN (PERSERO) PERIODE 2010-2012

**Fitriani Rahma Praja Budiono**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Dian Nuswantoro Semarang

## **ABSTRACT**

*In this research issues raised, namely: how the performance of PT. PLN (Persero) in financial aspect during the period 2010-2012 according to the Decree of the Minister of SOE (State Owned Enterprises) No. KEP-100/MBU/2002 about the rating of health level of SOE. The purpose of this research is analyzing the financial performance of PT. PLN (Persero) in the period 2010-2012 based on that Decree of the Minister of SOE. The analytical method used in this research is a quantitative descriptive analysis method using analytical tools eight indicators of financial ratios based on the Decree of the Minister of SOE No. KEP-100/MBU/2002, namely: ROE, ROI, cash ratio, current ratio, collection periods, inventory turn over, total assets turn over, and total equity to total assets ratio.*

*From the analysis results using that eight indicators, it is known that during 2010-2012, the company's financial performance declined and experienced some fluctuating circumstances. Based on the Decree of the Minister of SOE No. KEP-100/MBU/2002, the financial performance of PT. PLN (Persero) for 2010-2012 is in the category of "LESS HEALTHY" with a total score the rating of health level of 62 and predicate BBB for 2010, for 2011 a total score of 53 with predicate BBB, and in 2012 dropped predicate to BB with a total score of 46. Be expected that with the implementation of the Fast Track Program 10,000 MW Phase I (FTP-I) by PT. PLN (Persero) which is expected to be completed between 2013 and 2014, it can immediately improve the company's financial performance better in the future.*

*Keywords : Decree of the Minister of SOE No. KEP-100/MBU/2002, Financial Performance, ROE, ROI, Cash Ratio, Current Ratio, Collection Periods, Inventory Turn Over, Total Assets Turn Over, and Total Equity to Total Assets Ratio.*

## **PENDAHULUAN**

Badan Usaha Milik Negara atau yang disebut BUMN, sebagaimana yang dimaksud dalam UU RI No. 19 tahun 2003 pasal 1, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Salah satu BUMN yang kini kinerjanya menjadi sorotan adalah PT. PLN (Persero) yang biasa disebut dengan PLN, merupakan perusahaan BUMN yang berbentuk persero yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan dan pendistribusian tenaga listrik. Sejak disahkannya UU RI No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PLN bukan lagi bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), namun sebagai BUMN yang memiliki tugas untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Tugas baru yang diemban PLN ini, dapat menjadi peluang bagi PLN untuk melakukan pengembangan usahanya dan sekaligus menjadi tantangan bagi PLN untuk menyediakan infrastruktur ketenagalistrikan dan pasokan listrik yang memadai dengan menggunakan sumber daya energi tenaga listrik yang mudah diperoleh, terjangkau, dan ramah lingkungan dalam merespon permintaan tenaga listrik yang berkembang semakin pesat dari waktu ke waktu.

Mengingat perannya yang sangat vital, maka PLN perlu melakukan analisis untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerjanya. Karena mengukur kinerja dan membangun sistem penilaian kinerja merupakan salah satu hal penting dalam perusahaan (Ardini, 2008). Dengan mengukur dan menilai kinerja perusahaan dengan indikator penilaian kinerja yang ada, perusahaan dapat mengetahui bagaimana kesehatan kinerjanya, yaitu apakah sudah termasuk kategori sehat atau tidak. Perusahaan dengan kondisi yang sehat akan lebih mampu bertahan menghadapi persaingan, sedangkan perusahaan yang mengalami kondisi kurang sehat atau pun tidak sehat cenderung akan kesulitan dalam menghadapi persaingan dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Untuk perusahaan BUMN, penilaian kinerja keuangan perusahaan dapat mengacu pada Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN dengan menggunakan delapan indikator rasio keuangan, yaitu ROE, ROI, rasio kas, rasio lancar, *collection periods*, perputaran persediaan, perputaran total asset, dan rasio modal sendiri terhadap total aktiva.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan PT. PLN (Persero) pada periode 2010-2012 apabila diukur dengan menggunakan delapan indikator analisis rasio keuangan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Definisi Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan merupakan salah satu aspek kinerja yang dianggap penting dan juga menjadi perhatian utama perusahaan yang dapat tercermin dari data dan informasi keuangan perusahaan, yaitu yang secara umum dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan (Orniati, 2009).

### **Definisi Rasio Keuangan**

Istilah rasio keuangan didefinisikan Kasmir (2013) sebagai kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya dalam satu periode maupun beberapa periode atau membandingkan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di laporan keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk menyederhanakan informasi dan data keuangan yang disajikan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan agar dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah hubungan antar unsur dalam laporan keuangan bagi berbagai pihak.

### **Tujuan dan Manfaat Rasio Keuangan**

Maith (2013) menyatakan bahwa analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan maupun kinerja yang telah dicapai perusahaan untuk suatu periode tertentu, yaitu apakah keadaan keuangan perusahaan dalam kondisi yang baik atau tidak, apakah perusahaan telah mencapai standar kinerja yang dipersyaratkan atau tidak, dan apakah tingkat kinerja keuangan perusahaan baik atau sebaliknya. Rasio keuangan dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan kondisi keuangan dan prestasi perusahaan dari waktu ke waktu, dan kecenderungan (tren) dari pola perubahan tersebut sehingga dapat digunakan untuk memprediksi keberlanjutan kinerja perusahaan, termasuk risiko dan peluang yang akan dihadapi perusahaan pada masa mendatang.

### **Definisi Evaluasi Kinerja**

Pandangan mengenai evaluasi kinerja didefinisikan oleh Ardini (2008) sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari elemen-elemen yang ada di dalam

perusahaan yang akan dibandingkan dengan suatu standar atau target maupun harapan-harapan yang ingin dicapai. Evaluasi kinerja merupakan sebuah proses pengukuran atau penilaian untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

### **Evaluasi Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Keuangan**

Menurut Kasmir (2013), untuk dapat mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan rasio keuangan agar dapat digunakan pula untuk melihat kondisi kesehatan perusahaan, diperlukan suatu standar perbandingan. Subramanyam dan Wild (2013) menyatakan bahwa rasio keuangan akan lebih bermanfaat apabila diinterpretasikan dalam perbandingan dengan: (1) rasio tahun sebelumnya atau yang dikenal pula dengan perbandingan *time-series*, (2) standar yang ditentukan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan suatu patokan atau pedoman umum yang dapat digunakan sebagai *benchmark* untuk perbandingan tingkat rasio keuangan yang tepat, dan (3) rasio pesaing atau yang dikenal pula dengan perbandingan silang (*cross-sectional*).

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penentuan objek penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan PT. PLN (Persero) sebagai objek penelitiannya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk dapat menganalisis kinerja keuangan PT. PLN (Persero), maka dalam penelitian ini menggunakan alat analisis delapan indikator rasio keuangan sesuai tata cara penilaian kinerja keuangan BUMN untuk kategori non jasa keuangan yang bergerak di bidang infrastruktur berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Indikator dan Bobot Aspek Keuangan

<b>Indikator</b>	<b>Bobot</b>
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15
2. Imbalan Investasi (ROI)	10
3. Rasio Kas	3
4. Rasio Lancar	4
5. Collection Periods	4
6. Perputaran persediaan	4
7. Perputaran total asset	4
8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	6
<b>Total Bobot</b>	<b>50</b>

Sumber: Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002

Adapun rincian untuk masing-masing indikator rasio keuangan adalah:

- 1) Imbalan kepada pemegang saham/ *return on equity* (ROE), yaitu rasio yang digunakan untuk menunjukkan besarnya pengembalian yang diperoleh pemilik perusahaan (pemegang saham) atas jumlah ekuitas yang telah ditanamkan di perusahaan. Rumus untuk menghitung ROE sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 adalah:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

Adapun rincian skor penilaian untuk ROE sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 adalah:

Tabel 2. Daftar Skor Penilaian ROE

ROE (%)	Skor
15 < ROE	15
13 < ROE <= 15	13,5
11 < ROE <= 13	12
9 < ROE <= 11	10,5
7,9 < ROE <= 9	9
6,6 < ROE <= 7,9	7,5
5,3 < ROE <= 6,6	6
4 < ROE <= 5,3	5
2,5 < ROE <= 4	4
1 < ROE <= 2,5	3
0 < ROE <= 1	1,5
ROE < 0	1

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

- 2) Imbalan investasi/ *return on investment* (ROI), yaitu rasio yang digunakan untuk menunjukkan tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh investasi yang ditanam dalam bentuk aktiva.

Rumus untuk menghitung ROI sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 adalah:

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital employed}} \times 100\%$$

Adapun rincian skor penilaian untuk ROI sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 adalah:

Tabel 3. Daftar Skor Penilaian ROI

ROI (%)	Skor
18 < ROI	10
15 < ROI <= 18	9
13 < ROI <= 15	8
12 < ROI <= 13	7
10,5 < ROI <= 12	6
9 < ROI <= 10,5	5
7 < ROI <= 9	4
5 < ROI <= 7	3,5
3 < ROI <= 5	3
1 < ROI <= 3	2,5
0 < ROI <= 1	2
ROI < 0	0

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

- 3) Rasio kas (*cash ratio*), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek yang akan segera atau harus

dipenuhi dengan menggunakan kas maupun setara kas lainnya yang tersedia dalam perusahaan.

Rumus untuk menghitung rasio kas (*cash ratio*) sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 adalah:

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat berharga jangka pendek}}{\text{Current liabilities}} \times 100\%$$

Adapun rincian skor penilaian untuk *cash ratio* sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 adalah:

Tabel 4. Daftar Skor Penilaian *Cash Ratio*

<b>Cash Ratio = x (%)</b>	<b>Skor</b>
x >= 35	3
25 <= x < 35	2,5
15 <= x < 25	2
10 <= x < 15	1,5
5 <= x < 10	1
0 <= x < 5	0

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

- 4) Rasio lancar (*current ratio*), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancarnya. Rumus untuk menghitung rasio lancar (*current ratio*) sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 adalah:

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Current asset}}{\text{Current liabilities}} \times 100\%$$

Adapun rincian skor penilaian untuk *current ratio* sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 adalah:

Tabel 5. Daftar Skor Penilaian *Current Ratio*

<b>Current Ratio = x (%)</b>	<b>Skor</b>
125 <= x	3
110 <= x < 125	2,5
100 <= x < 110	2
95 <= x < 100	1,5
90 <= x < 95	1
x < 90	0

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

- 5) *Collection periods* (CP), yaitu rasio yang digunakan untuk menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan perusahaan untuk menagih atau mengumpulkan piutangnya. Rumus untuk menghitung *collection periods* (CP) sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 adalah:

$$\text{CP} = \frac{\text{Total piutang usaha}}{\text{Total pendapatan usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Adapun rincian skor penilaian untuk *collection periods* (CP), sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 adalah:

Tabel 6. Daftar Skor Penilaian *Collection Periods*

CP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor
x ≤ 60	x > 35	4
60 < x ≤ 90	30 < x ≤ 35	3,5
90 < x ≤ 120	25 < x ≤ 30	3
120 < x ≤ 150	20 < x ≤ 25	2,5
150 < x ≤ 180	15 < x ≤ 20	2
180 < x ≤ 210	10 < x ≤ 15	1,6
210 < x ≤ 240	6 < x ≤ 10	1,2
240 < x ≤ 270	3 < x ≤ 6	0,8
270 < x ≤ 300	1 < x ≤ 3	0,4
300 < x	0 < x ≤ 1	0

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

- 6) Perputaran persediaan (PP), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam mengelola persediaannya.  
Rumus untuk menghitung perputaran persediaan (PP) sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 adalah:

$$PP = \frac{\text{Total persediaan}}{\text{Total pendapatan usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Adapun rincian skor penilaian untuk perputaran persediaan (PP) sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 adalah:

Tabel 7. Daftar Skor Penilaian Perputaran Persediaan

PP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor
x ≤ 60	35 < x	4
60 < x ≤ 90	30 < x ≤ 35	3,5
90 < x ≤ 120	25 < x ≤ 30	3
120 < x ≤ 150	20 < x ≤ 25	2,5
150 < x ≤ 180	15 < x ≤ 20	2
180 < x ≤ 210	10 < x ≤ 15	1,6
210 < x ≤ 240	6 < x ≤ 10	1,2
240 < x ≤ 270	3 < x ≤ 6	0,8
270 < x ≤ 300	1 < x ≤ 3	0,4
300 < x	0 < x ≤ 1	0

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

- 7) Perputaran total asset/ *total asset turn over* (TATO), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola aktivasinya.  
Rumus untuk menghitung *total assets turn over* (TATO) sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 adalah:

$$TATO = \frac{\text{Total pendapatan}}{\text{Capital employed}} \times 100\%$$

Adapun rincian skor penilaian untuk *total assets turn over* (TATO) sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 adalah:

Tabel 8. Daftar Skor Penilaian Perputaran Total Asset

TATO = x (%)	Perbaikan = x (%)	Skor
120 < x	20 < x	4
105 < x ≤ 120	15 < x ≤ 20	3,5
90 < x ≤ 105	10 < x ≤ 15	3
75 < x ≤ 90	5 < x ≤ 10	2,5
60 < x ≤ 75	0 < x ≤ 5	2
40 < x ≤ 60	x ≤ 0	1,5
20 < x ≤ 40	x < 0	1
x ≤ 20	x < 0	0,5

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

- 8) Rasio total modal sendiri terhadap total asset (TMS terhadap TA), yaitu rasio yang digunakan untuk menyatakan tingkat solvabilitas perusahaan dalam menunjukkan besarnya modal sendiri yang digunakan untuk mendanai seluruh aktiva perusahaan. Rumus untuk menghitung rasio total modal sendiri terhadap total asset (TMS terhadap TA) sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 adalah:

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total modal sendiri}}{\text{Total asset}} \times 100 \%$$

Adapun rincian skor penilaian untuk rasio total modal sendiri terhadap total asset (TMS terhadap TA) sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 adalah:

Tabel 9. Daftar Skor Penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

TMS thd TA (%) = x	Skor
x < 0	0
0 ≤ x < 10	2
10 ≤ x < 20	3
20 ≤ x < 30	4
30 ≤ x < 40	6
40 ≤ x < 50	5,5
50 ≤ x < 60	5
60 ≤ x < 70	4,5
70 ≤ x < 80	4,25
80 ≤ x < 90	4
90 ≤ x < 100	3,5

Sumber: Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002

Dari hasil total skor penilaian seluruh rasio keuangan tersebut, dapat digunakan pula untuk menilai tingkat kesehatan kinerja keuangan PT. PLN (Persero). Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 pasal 3, penilaian tingkat kesehatan BUMN dapat digolongkan menjadi :

- a. SEHAT, yang terdiri dari :
  - AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95
  - AA apabila 80 < TS ≤ 95
  - A apabila 65 < TS ≤ 80
- b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :

- BBB apabila  $50 < TS \leq 65$   
 BB apabila  $40 < TS \leq 50$   
 B apabila  $30 < TS \leq 40$
- c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
- CCC apabila  $20 < TS \leq 30$   
 CC apabila  $10 < TS \leq 20$   
 C Apabila  $TS \leq 10$

## PEMBAHASAN

Adapun secara ringkas, hasil penilaian kinerja keuangan PT. PLN (Persero) selama periode 2010-2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 10. Penilaian Kinerja Keuangan PT. PLN (Persero) Periode 2010-2012

Rasio	2010		2011		2012	
	Nilai Rasio	Skor	Nilai Rasio	Skor	Nilai Rasio	Skor
ROE (%)	6,74	7,5	3,72	4	2,13	3
ROI (%)	9,13	5	5,89	3,5	4,69	3
Cash Ratio (%)	35,88	3	34,76	2,5	30,35	2,5
Current Ratio (%)	81,48	0	91,66	1	92,01	1
Collection Periods (hari)	6,46	4	6,15	4	6,04	4
Perputaran Persediaan (hari)	22,32	4	27,47	4	26,26	4
TATO (%)	61,89	2	56,26	1,5	53,13	1,5
TMS terhadap TA (%)	40,54	5,5	31,21	6	27,85	4
<b>Total Skor Penilaian Kinerja Keuangan</b>		<b>31</b>		<b>26,5</b>		<b>23</b>
<b>Total Skor Penilaian Tingkat Kesehatan</b> (= Total Skor Penilaian Kinerja Keuangan : Nilai Ekuivalen 50%)		<b>62</b>		<b>53</b>		<b>46</b>
<b>Kategori Tingkat Kesehatan PT. PLN (Persero) Periode 2010-2012</b>		<b>BBB (Kurang Sehat)</b>		<b>BBB (Kurang Sehat)</b>		<b>BB (Kurang Sehat)</b>

Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian, 2014

Kinerja keuangan PT. PLN (Persero) selama tahun 2010-2012 apabila diukur menggunakan delapan indikator analisis rasio keuangan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara ini, ternyata menunjukkan adanya penurunan karena masih tergolong dalam kategori “KURANG SEHAT” dan terakhir pada tahun 2012 predikat perusahaan menjadi “BB” (berada pada posisi interval  $40 < TS \leq 50$ ) dari sebelumnya “BBB” (berada pada posisi interval  $50 < TS \leq 65$ ) pada tahun 2010 dan 2011. Hal ini terjadi karena pada delapan indikator rasio keuangan sebagai komponen dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, mengalami beberapa keadaan yang berfluktuatif, seperti:

1. Masih rendahnya imbalan kepada pemegang saham/ *return on equity* (ROE)  
 Penurunan nilai dan skor rasio ini yang terjadi berturut-turut selama tiga periode terakhir yaitu pada tahun 2011 sebesar 3,02% (selisih nilai ROE pada tahun 2011 sebesar 3,72% terhadap nilai ROE pada tahun 2010 sebesar 6,74%) dan pada tahun 2012 sebesar 1,59% (selisih nilai ROE pada tahun 2012 sebesar 2,13% terhadap nilai



ROE pada tahun 2011 sebesar 3,72%), menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan ekuitas atau modal sendiri mengalami penurunan. Penurunan ROE yang terjadi selama periode 2010-2012 ini disebabkan adanya penurunan pada laba tahun berjalan dan jumlah laba komprehensif yang terjadi terutama sehubungan dengan adanya fluktuasi kurs mata uang rupiah terhadap berbagai mata uang asing sehingga perusahaan mencatat kerugian kurs mata uang asing tahun 2011 dan 2012 sebesar 181,92% dan 223,91%, adanya peningkatan pada beban keuangan perusahaan, dan adanya kenaikan beban bahan bakar dan pelumas akibat adanya kenaikan harga BBM disertai adanya peningkatan biaya pembelian bahan bakar non-BBM (batubara dan gas), selain itu, pada tahun 2012 terjadi peningkatan pembelian tenaga listrik yang sangat tinggi akibat kebutuhan listrik yang terus meningkat.

2. Masih rendahnya imbalan investasi/ *return on investment* (ROI) perusahaan  
Penurunan yang juga terjadi pada rasio ini selama tiga periode berturut-turut, yang ditunjukkan pada hasil perhitungan nilai dan skor ROI yang ada yaitu pada tahun 2011 turun sebesar 3,24% (selisih nilai ROI pada tahun 2011 sebesar 5,89% terhadap nilai ROI pada tahun 2010 sebesar 9,13%) dan pada tahun 2012 sebesar 1,20% (selisih nilai ROI pada tahun 2012 sebesar 4,69% terhadap nilai ROI pada tahun 2011 sebesar 5,89%), mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva yang ada pada perusahaan mengalami penurunan. Penurunan ROI pada periode 2010-2012 disebabkan adanya penurunan laba sebelum pajak + penyusutan namun disertai dengan kenaikan pada *capital employed* akibat adanya penambahan aset tetap yang berasal dari pemindahan pekerjaan dalam pelaksanaan yang telah selesai dan siap digunakan, adanya kenaikan persediaan yang dialokasikan terutama untuk bahan bakar dan pelumas pada tahun 2011, dan adanya kenaikan pada piutang subsidi listrik sebagai komposisi terbesar kedua aset lancar pada tahun 2012.
3. Sudah cukup baiknya rasio kas (*cash ratio*) perusahaan  
Meskipun selama tiga periode terakhir nilai *cash ratio* mengalami penurunan yaitu pada tahun 2011 sebesar 1,12% (selisih nilai *cash ratio* pada tahun 2011 sebesar 34,76% terhadap nilai *cash ratio* pada tahun 2010 sebesar 35,88%) dan pada tahun 2012 sebesar 4,41% (selisih nilai *cash ratio* pada tahun 2012 sebesar 30,35% terhadap nilai *cash ratio* pada tahun 2011 sebesar 34,76%), namun kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya yang ditunjukkan dengan indikator *cash ratio* ini, perusahaan masih dalam keadaan baik. Hal ini disebabkan adanya kenaikan pada *current liabilities* (liabilitas jangka pendek) yang lebih besar daripada kenaikan kas dan setara kas akibat adanya kenaikan utang usaha pihak berelasi pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 adanya kenaikan utang usaha pihak ketiga disertai adanya kenaikan utang bank dan surat utang jangka menengah.
4. Belum optimalnya rasio lancar (*current ratio*) perusahaan  
Meskipun selama tiga tahun terakhir, nilai *current ratio* yang diperoleh PT. PLN (Persero) terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2011 sebesar 10,18% (selisih nilai *current ratio* pada tahun 2011 sebesar 91,66% terhadap tahun 2010 sebesar 81,48%) dan pada tahun 2012 sebesar 4,41% (selisih nilai *current ratio* pada tahun 2012 sebesar 92,01% terhadap tahun 2011 sebesar 91,66%), namun kenaikan nilai *current ratio* ini belum cukup untuk dikatakan baik karena masih berada pada posisi interval yang cukup rendah. Hal ini terjadi disebabkan adanya kenaikan pada *current liabilities* (liabilitas jangka pendek) akibat adanya kenaikan utang usaha pihak

berelasi pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 adanya kenaikan utang usaha pihak ketiga disertai adanya kenaikan utang bank dan surat utang jangka menengah.

5. Sudah optimalnya *collection periods* (CP) perusahaan  
Selama periode 2010-2012, dinyatakan bahwa nilai *collection periods* perusahaan memperoleh skor tertinggi yaitu 4 karena nilai rasio selama tiga periode terakhir tersebut berada pada posisi interval  $x \leq 60$  (pada tahun 2010 sebesar 6,46 hari, tahun 2011 sebesar 6,15 hari, dan pada tahun 2012 sebesar 6,04 hari) atau bisa dikatakan bahwa kemampuan perusahaan dalam menagih atau mengumpulkan piutangnya sangat baik. Hal ini terjadi akibat adanya kenaikan piutang usaha perusahaan yang disebabkan oleh adanya kenaikan piutang oleh seluruh kategori langganan (Pemerintah, TNI dan Polri, serta umum), kecuali bagi BUMN pada tahun 2011. Namun pada tahun 2012, kenaikan piutang usaha perusahaan mengalami sedikit penurunan setelah adanya pelunasan pembayaran tagihan listrik dari Pemerintah, TNI dan Polri yang sebelumnya tertunda.
6. Sudah optimalnya perputaran persediaan (PP) perusahaan  
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa selama tiga tahun berturut-turut rasio perputaran persediaan pada PT. PLN (Persero) mendapat skor tertinggi, yaitu 4 karena berada pada posisi interval  $x \leq 60$  (pada tahun 2010 sebesar 22,32 hari, tahun 2011 sebesar 27,47 hari, dan pada tahun 2012 sebesar 26,26 hari) atau bisa dikatakan bahwa perusahaan telah mengelola persediaannya secara efektif dan efisien, yaitu dengan menunjukkan bahwa semakin singkat waktu rata-rata yang diperlukan perusahaan antara penanaman modal dalam persediaan dan transaksi penjualan. Hal ini terjadi akibat adanya kenaikan persediaan perusahaan yang disebabkan oleh adanya kenaikan persediaan yang dialokasikan untuk bahan bakar dan pelumas pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 adanya kenaikan pada nilai persediaan *switchgear* dan jaringan, serta pada persediaan umum.
7. Belum optimalnya perputaran total asset/ *total assets turn over* (TATO)  
Berdasarkan kriteria skor penilaian yang ada sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, nilai dan skor TATO perusahaan selama tiga periode terakhir masih tergolong rendah (pada tahun 2010 mendapat skor 2 karena berada pada posisi interval  $60 < x \leq 75$ , sedangkan untuk tahun 2011 dan 2012 mendapat skor 1,5 karena sama-sama berada pada posisi interval  $40 < x \leq 60$ ) atau bisa dikatakan bahwa perusahaan belum secara optimal memanfaatkan seluruh aktiva yang digunakan untuk menunjang kegiatan penjualan secara efisien. Hal ini terjadi disebabkan adanya kenaikan pada *capital employed* yang lebih besar daripada kenaikan pendapatan usahanya akibat adanya pekerjaan dalam pelaksanaan yang telah selesai dan dipindahkan ke aset tetap masing-masing, adanya kenaikan persediaan yang dialokasikan terutama untuk bahan bakar dan pelumas pada tahun 2011, dan adanya kenaikan pada piutang subsidi listrik sebagai komposisi terbesar kedua aset lancar pada tahun 2012.
8. Sudah cukup baiknya rasio total modal sendiri terhadap total asset (TMS terhadap TA)  
Berdasarkan kriteria skor penilaian rasio TMS terhadap TA yang ada sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, nilai rasio ini selama tiga tahun terakhir masih dihitung tinggi meskipun terjadi fluktuasi nilai skor selama periode tersebut (pada tahun 2010 mendapat skor 5,5 karena berada pada posisi interval  $40 < x \leq 50$ , pada tahun 2011 mendapat skor tertinggi yaitu 6 karena berada pada posisi interval  $30 < x \leq 40$ , dan pada tahun 2012 mendapat skor 4 karena berada pada posisi interval  $20 < x \leq 30$ ) atau bisa dikatakan bahwa kemampuan perusahaan dalam mendanai seluruh aktivasinya dengan modal sendiri yang dimiliki selama tiga tahun

terakhir cukup baik. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya penurunan jumlah ekuitas perusahaan pada tahun 2011 akibat adanya penurunan yang cukup signifikan dari saldo laba yang tidak ditentukan penggunaannya dan adanya kenaikan jumlah aset perusahaan pada tahun 2012 akibat adanya penambahan aset tetap sehubungan dengan mulai terealisasinya proyek FTP-I dan adanya kenaikan piutang subsidi listrik yang sebagian besar diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan kebutuhan subsidi yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok pelanggan lain (kelompok pelanggan usaha bisnis, industri, dan umum).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, pada tahun 2010 kinerja keuangan PT. PLN (Persero) masuk kategori “KURANG SEHAT” dengan predikat BBB, karena total skor penilaian tingkat kesehatan yang diperoleh perusahaan adalah 62 berada diantara interval  $50 < TS \leq 65$ .
2. Pada tahun 2011, total skor penilaian tingkat kesehatan yang diperoleh perusahaan adalah 53 (berada diantara interval  $50 < TS \leq 65$ ), menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT. PLN (Persero) berada pada kategori “KURANG SEHAT” dengan predikat BBB.
3. Sedangkan pada tahun 2012, hasil penilaian kinerja keuangan PT. PLN (Persero) dinyatakan berada pada tingkat “KURANG SEHAT” dengan predikat menjadi BB dari yang sebelumnya BBB, karena total skor penilaian tingkat kesehatan yang diperoleh perusahaan adalah 46 berada diantara interval  $40 < TS \leq 50$ .
4. Selama periode 2010-2012, kinerja keuangan PT. PLN (Persero) mengalami penurunan dan berada pada kategori “KURANG SEHAT”, karena pada delapan indikator rasio keuangan sebagai komponen dalam penilaian kinerja keuangan BUMN sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, mengalami beberapa keadaan yang berfluktuatif, seperti belum optimalnya kinerja keuangan perusahaan apabila dilihat dari sisi ROE, ROI, *current ratio*, *total asset turn over* (TATO), namun apabila keadaan kinerja keuangan perusahaan dilihat dari sisi *cash ratio*, *collection periods*, perputaran persediaan, dan rasio modal sendiri terhadap total aktiva (TMS terhadap TA), menunjukkan hasil yang sudah cukup baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 Tahun 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

- Ardini, Lilis. 2008. "Evaluasi Tata Cara Penilaian untuk PTPN XII (Persero) Berdasarkan KEP-100/MBU/2002". Dalam Jurnal *Ekuitas*, Vol. 12, No. 2, Edisi Juni, Hal. 202-226.
- Kasmir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Maith, Hendry Andres. 2013. "Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk". Dalam Jurnal *Emba*, Vol. 1, No. 3, Edisi September, Hal. 619-628.
- Orniati, Yuli. 2009. "Laporan Keuangan sebagai Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan". Dalam Jurnal *Ekonomi Bisnis*, Vol. 14, No. 3, Edisi November, Hal. 206-213.
- Subramanyam dan John J. Wild. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.